

ABSTRAK
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN
TERHADAP HAK POLITIK DEBITOR PAILIT

Pada dasarnya kepailitan merupakan ranah bisnis, menariknya selain sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa peraturan-perundang-undangan di Indonesia yang sama sekali tidak berbau bisnis namun mencantumkan pailit dalam substansinya, sehingga mengharuskan kita merujuk pada Undang-undang kepailitan untuk memaknainya. Satu contoh misalnya untuk bisa mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada seseorang harus menyertakan surat keterangan tidak pailit.

Akibat hukum yang utama setelah seseorang debitor dinyatakan pailit adalah debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas dan mengurus harta kekayaannya dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Seharusnya jika suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan ketentuan akibat kepailitan di dalamnya, maka sudah seharusnya ketentuan itu selaras dengan hakikat hukum kepailitan yang sesungguhnya.

ABSTRACT
BANKRUPTCY EFFECT TOWARDS DEBTOR'S POLITICAL RIGHTS

Basically bankruptcy is the realm of business, other than as noted above, there are some rules and regulations in Indonesia outside of business law but include bankruptcy, in substance, that requires us to refer to the bankruptcy laws to interpret. One example is to be nominated as a regional head and deputy regional head at one election must include a statement of bankruptcy.

The main legal consequences after the debtor is declared bankrupt debtor by operation of law loses its right to act with impunity and take care of his wealth and not about personal self debtor bankrupt. Supposedly if the legislation included provisions due to bankruptcy in it, then it should have been provisions in harmony with the true nature of bankruptcy law.